



# BULETIN

# PEMBANGUNAN DAERAH

*Volume 1 Nomor 1, Juni 2022*

**B A P P E D A K O T A B O G O R**



# Kata Pengantar



**S**egala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor bisa menyelesaikan penerbitan Buletin Pembangunan Daerah. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Buletin Pembangunan Daerah ini merupakan edisi perdana yang diterbitkan sebagai sarana komunikasi dan publikasi informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kota Bogor.

Akhirnya, kami mengharapkan semoga buletin ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

**Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bogor**



**Rudy Mashudi, S.T., MP**

# SUSUNAN REDAKSI

**Pengarah:**

Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si.

**Penanggung jawab:**

Rudy Mashudi, S.T., MP

**Ketua Tim Redaksi :**

Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc.

**Tim Redaksi:**

Lusi Nurbaiti Badri, ST, M.Si

Oni Hidayati, S.Pi, M.Si

Arif Wicaksono, SP, M.Si, Ph.D

Ratu Desy Savitri, ST, MT

Erni Solikhati, SE

Andri Agus Rahman, S.Kom

**Desain Grafis dan Fotografer:**

Adytia Gumelar, S.PWK.

Lise Listianti, S.Stat.

**Sekretariat:**

Imam Santoso, SE, MM

Gandi Aria Wijaya, SP, MSi

Muhsin Muhammad Mahdi, S.Sos

**Mitra Bestari:**

Dr. Ir. Bambang Sulistyantara

(IPB University)

Dr. Ir. Budi Susetyo, M.Sc

(Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Dr. Eka Suhardi

(Universitas Pakuan)

Dr. Eko Sakapurnama

(Universitas Indonesia)

Gunawan, SP, M.Si

(Pusat Perpustakaan dan Penyebaran  
Teknologi Pertanian Kementan RI)

Ifan Muttaqien, SP, MIT

(Pusat Perpustakaan dan Penyebaran  
Teknologi Pertanian Kementan RI)

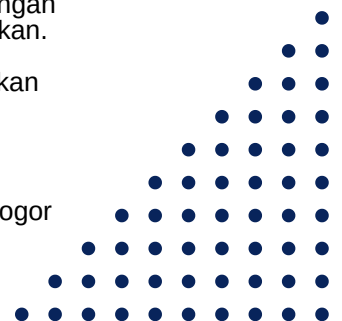
Redaksi menerima kiriman tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan dengan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dan belum pernah dipublikasikan.

Bagi yang ingin berkontribusi mengisi buletin ini, dapat mengirimkan naskah tulisan artikel serta data identitas diri ke alamat:

Bidang Penelitian dan Pembangunan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor  
Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor  
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122

atau

[bit.ly/FormArtikelBuletin](https://bit.ly/FormArtikelBuletin)



# Daftar Isi

## ARTIKEL ILMIAH POPULER

- 2 TRANSFORMASI DIGITAL PROSES  
MUTASI PNS KE DALAM  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
BOGOR MELALUI APLIKASI  
AUSEP

---

- 8 PENGEMBANGAN KAJIAN  
PERENCANAAN KAMPUNG  
TEMATIK DI KOTA BOGOR DARI  
PERSPEKTIF GEOSPASIAL

---

- 14 INOVASI SINERGI PENTA HELIX  
UNTUK CEGAH STUNTING  
DI KOTA BOGOR

---

- 23 BOGOR MENUJU KOTA INOVASI

---

- 27 TINGKATKAN LAYANAN, KOTA  
BOGOR LUNCURKAN BERAGAM  
INOVASI

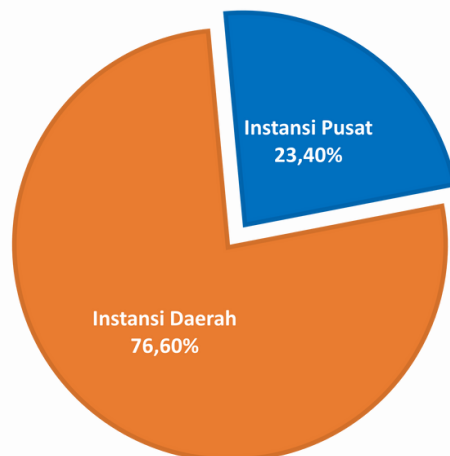
---

# TRANSFORMASI DIGITAL PROSES MUTASI PNS KE DALAM PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR MELALUI APLIKASI AUSEP

**Idham Irawan, S.E**  
BKPSDM Kota Bogor

**B**

erdasarkan data statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) Desember 2021 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.995.634 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat) orang. Jumlah PNS yang bekerja di instansi pusat sebesar 23,4%, sedangkan PNS yang bekerja di instansi daerah 76,6% (Gambar 1). Secara kuantitas, PNS pada instansi daerah lebih besar dibandingkan dengan instansi pusat.



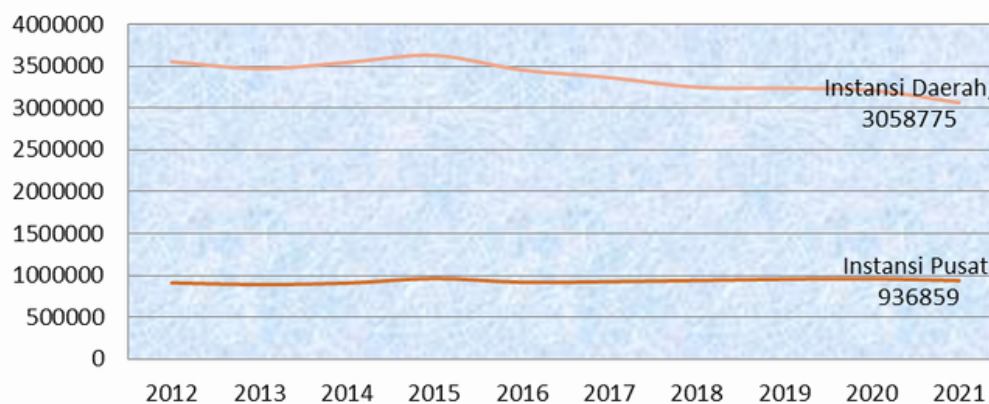
**GAMBAR 1. RASIO PNS DI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021**

*Sumber: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara*

Pertumbuhan PNS pada sepuluh tahun terakhir mulai dari tahun 2012 s.d tahun 2021 pada instansi pusat menunjukkan tren positif (Tabel 1). Sedangkan pada instansi daerah cenderung menurun. Pertumbuhan PNS instansi daerah mengalami angka penurunan dan pergerakannya berjalan lambat. Artinya perlu beberapa dekade untuk membuat sebaran PNS merata di seluruh Indonesia. Lebih jelasnya pertumbuhan PNS sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.

**TABEL 1. ANGKA PERTUMBUHAN PNS SEPULUH TAHUN TERAKHIR**

Tahun	Instansi Pusat	Instansi Daerah	Total
2012	910.939 (20%)	3.557.043 (80%)	4.467.982
2013	891.509 (20%)	3.471.296 (80%)	4.362.805
2014	908.252 (20%)	3.547.051 (80%)	4.455.303
2015	960.795 (21%)	3.632.809 (79%)	4.593.604
2016	918.436 (21%)	3.455.905 (79%)	4.374.341
2017	925.248 (22%)	3.364.148 (78%)	4.289.396
2018	939.236 (22%)	3.246.267 (78%)	4.185.503
2019	953.371 (23%)	3.235.390 (77%)	4.188.761
2020	958.919 (23%)	3.209.199 (77%)	4.168.118
2021	936.859 (23%)	3.058.775 (77%)	3.995.634



**GAMBAR 2. GRAFIK PERTUMBUHAN PNS SEPULUH TAHUN TERAKHIR**

Sumber: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Sampai dengan saat ini proses permohonan mutasi PNS masih menjadi isu klasik kepegawaian di instansi pusat maupun instansi daerah. Adapun alasan permohonan mutasi diantaranya karena pertimbangan pengembangan karir, perampangan organisasi, kepentingan keluarga, dan kepentingan lain dari PNS yang bersangkutan. Sedangkan mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Terbatasnya formasi jabatan serta sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh PNS yang mengajukan mutasi berpotensi terjadinya praktek korupsi dalam proses mutasi. Hal ini sesuai dengan hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai area rawan korupsi. Salah satunya adalah manajemen ASN, melalui hal sebagai berikut:

1. *Spoils system*;
2. Jual beli jabatan;
3. Suap;
4. Gratifikasi.

Pada praktiknya proses mutasi PNS banyak disalahgunakan oleh pejabat/PNS dan pihak yang berkepentingan. *Spoils system* disebabkan karena PNS yang memiliki kedekatan dengan pejabat di pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya politisasi birokrasi. Jual beli jabatan diketahui karena adanya pejabat/PNS meminta mahar untuk menunjuk orang-orang tertentu menempati suatu jabatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga di Indonesia terhadap 1.201 PNS pada tahun 2021, diketahui bahwa PNS didekati secara personal dan menerima suap agar melancarkan urusan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi terjadi pada seorang pejabat/PNS yang menerima pemberian atas hasil kerjanya berupa sebuah hadiah/imbalan.

Berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN), data mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor pada 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2018 s.d tahun 2022 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang yang terdiri dari PNS instansi pusat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dan PNS instansi daerah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang (Tabel 2).

TABEL 2.  
MUTASI PNS KE DALAM PEMERINTAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2018 S.D 2021

Instansi Pemerintah	Jumlah (orang)
Instansi Pusat	29
Instansi Daerah: a. 1 (satu Provinsi) = 21 b. Antar Provinsi = 48	69
Total	98

Sumber: Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Jumlah permohonan mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah cenderung naik berkaitan dengan rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Pemerintah mewajibkan instansi pusat untuk menyusun perencanaan pemindahan pegawainya ke IKN. Hal ini memicu banyaknya PNS yang menghindari pemindahan pegawai dengan mengajukan permohonan mutasi ke instansi daerah. Hal ini berdampak pada tingginya permohonan mutasi PNS ke Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Untuk menghadapi tantangan tersebut dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor perlu menerapkan penggunaan sistem pelayanan proses mutasi dari sistem konvensional (manual) ke sistem elektronik (digital).

## A. Dinamika Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor

Proses permohonan mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan beserta kelengkapan berkas persyaratan mutasi ke Kantor Pemerintah Daerah Kota Bogor. Oleh sebab itu, membutuhkan waktu, tenaga dan biaya bagi PNS yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, terdapat 17 (tujuh belas) berkas persyaratan mutasi yang wajib dipenuhi oleh PNS, sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan kertas dan *over capacity* penyimpanan arsip. Proses pengarsipan manual yang membutuhkan waktu lebih lama berdampak pada terhambatnya pengelolaan mutasi.

Pada dasarnya PNS yang bersangkutan berkeinginan proses mutasinya berjalan cepat karena berbagai alasan kepentingannya. Namun hal ini berpotensi menimbulkan suap dan gratifikasi. Untuk menghindari hal itu, pengelola kepegawaian BKPSDM Kota Bogor mengingatkan kepada PNS yang bersangkutan, bahwa proses usul mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak dipungut biaya, dan agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Proses mutasi PNS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Hambatan pada Proses Mutasi melalui Sistem Konvensional

Proses mutasi PNS dengan sistem manual menyebabkan tingginya tingkat penggunaan kertas dan *over capacity* penyimpanan arsip serta proses pengarsipannya membutuhkan waktu lebih lama yang mengakibatkan terhambatnya pengelolaan mutasi. Pengelolaan mutasi secara manual dapat memicu permasalahan yang mungkin timbul, diantaranya adalah sulit dalam melakukan monitoring kelengkapan berkas persyaratan mutasi, sulit mencari *progress* mutasi, sehingga perlu waktu untuk mencarinya. Apabila tidak dikelola secara cepat dan tepat, maka dapat mengganggu proses bisnis tugas dan fungsi lainnya.

Bagi PNS yang bersangkutan, proses mutasi memerlukan banyak waktu untuk mencari informasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pengelola kepegawaian di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Oleh sebab itu, PNS cenderung mengajukan cuti. Hal ini dapat mengurangi waktu kerja efektif, dan dapat berpengaruh pada pelayanan publik. Selain itu, PNS yang berasal dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau, maka memerlukan banyak tenaga dan biaya untuk membayar biaya transportasinya. Oleh sebab itu proses mutasi PNS secara manual dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Disamping itu, dampak dari koordinasi secara langsung salah satunya adalah PNS yang bersangkutan menghubungi pengelola kepegawaian secara personal. Bagi PNS yang mempunyai kepentingan mendesak, seringkali menghubungi pengelola kepegawaian secara intens melalui pesan singkat, percakapan *whatsapp* dan sambungan telepon. Selain dilakukan pada jam kerja, bahkan hal ini dilakukan diluar jam kerja dan di hari libur. Oleh sebab itu dirasakan sangat mengganggu kehidupan pribadi dan privasi pengelola kepegawaian.



### C. Upaya BKPSDM Kota Bogor dalam Menghadapi Tantangan

*Cloud computing* adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di *server internet*. Konsep layanan ini dinilai memudahkan PNS untuk mengakses data dan informasi dari mana saja (*anywhere*), kapan saja (*anytime*), secara cepat dan tepat (*real time*) dengan perangkat yang memungkinkan PNS terhubung dengan jaringan/*internet*. Digitalisasi dimungkinkan mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pelayanan prima (Gambar 3).

### HASIL PENELITIAN

Proses mutasi PNS secara elektronik telah menciptakan efisiensi dan efektivitas. Hal ini terbukti dengan menurunnya penggunaan kertas, dan penyimpanan ruang arsip. Dengan adanya transformasi digital telah membuat data dan informasi tersimpan melalui *cloud computing*. Sistem pengelolaan manajemen mutasi tertata lebih baik, pencarian data lebih mudah, dan *real time*. Proses mutasi, pembuatan laporan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Penyampaian permohonan mutasi PNS dan kelengkapan berkas mutasi PNS yang dilakukan secara *online* telah mendobrak batas-batas ruang, waktu, dan jarak serta menurunkan jumlah *visitor* mutasi PNS, sehingga meminimalisir potensi tindakan *spoils system*, jual beli jabatan, suap dan gratifikasi. Hal ini merupakan langkah konkret BKPSDM Kota Bogor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada area rawan korupsi, manajemen PNS.

Berdasarkan data Aplikasi AUSEP tanggal 25 Mei 2022, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) PNS telah aktivasi akun permohonan mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor.



GAMBAR 3. ARAH TRANSFORMASI DIGITAL

Pada bulan Maret 2022, BKPSDM Kota Bogor membangun sebuah aplikasi proses mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota Bogor yang bernama AUSEP. AUSEP merupakan akronim dari Administrasi Usulan Perpindahan Pegawai. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses mutasi dan penyampaian informasi proses mutasi mulai dari pengisian data profil PNS, kelengkapan persyaratan mutasi, informasi *progress* mutasi, surat persetujuan mutasi dari instansi asal, dan penerbitan rekomendasi dan SK mutasi (Gambar 4).



GAMBAR 4. PROSES BISNIS APLIKASI AUSEP

Pada tanggal 20 Mei 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi Proses Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota Bogor secara daring melalui *zoom meeting*. Peserta berasal dari 27 (dua puluh tujuh) instansi pemerintah dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dari 35 (tiga puluh lima) peserta undangan.

---

## PENUTUP

Penggunaan Aplikasi AUSEP pada proses mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor mempermudah dan mempercepat proses mutasi serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pada sistem manajemen mutasi. Penyajian data dan informasi secara *real time* dapat membantu menghasilkan pemberian rekomendasi kebijakan mutasi PNS dan bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada proses mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota Bogor. Aplikasi tersebut merupakan alat bantu, perlu dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara periodik.

## SUMBER

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.4/Kep.254-Bag.Org/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Badan Kepegawaian Negara. 2022. Statistik ASN Desember 2021.

Munir, Nasrullah, Sukirman dan Adnan, Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bima, 2021.

Humas KEMENPANRB, "Kolaborasi Kementerian PANRB dan KPK, Tutup Celah Korupsi dari Balik Meja

Birokrasi", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-kementerian-panrb-dan-kpk-tutup-celah-korupsi-dari-balik-meja-birokrasi>, diakses 27 Juni 2022.

# PENGEMBANGAN KAJIAN PERENCANAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA BOGOR DARI PERSPEKTIF GEOSPASIAL

*Dr. Arif Wicaksono*  
*Bappeda Kota Bogor*



Kampung tematik merupakan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan kampung tematik di Kota Bogor adalah terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, diharapkan juga bahwa pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah akan mendorong potensi ekonomi lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap tahun di dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024 ditargetkan tersusunnya rancang lanskap kampung tematik. Berkaitan dengan hal ini maka pada tahun 2021 telah disusun Kajian Prioritas Lokasi Pengembangan Kampung Tematik, dimana 39 usulan lokasi kampung tematik telah teridentifikasi.

Kajian Prioritas Lokasi Pengembangan Kampung Tematik ini telah menjadi pedoman dalam melaksanakan pengembangan kampung tematik di Kota Bogor. Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan adanya hasil kajian ini adalah kemudahan memperoleh akses data untuk kegiatan riset lanjutan yang dilakukan oleh mitra kerja Bappeda Kota Bogor.

Beberapa mitra kerja Bappeda Kota Bogor yang telah memanfaatkan kajian ini sebagai bahan riset lanjutan adalah Fakultas Teknik Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Dosen Departemen Arsitektur Lanskap IPB University.

Dengan suksesnya kajian tersebut yang datanya telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, maka perlu diidentifikasi kajian perencanaan kampung tematik lanjutan yang bersifat lintas bidang yang ada di Bappeda Kota Bogor. Hal ini juga ditunjang pesatnya teknologi geospasial yang bisa melakukan analisis keruangan menjelaskan hubungan antara sebuah lokasi kampung tematik dengan lokasi lainnya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kajian lanjutan kampung tematik sebagai pengembangan perencanaan ditinjau dari perspektif geospasial.

Pada bagian pertama artikel ini akan disajikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kampung tematik yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor dari awal tahun 2021 sampai sekarang. Selanjutnya bagian kedua akan disajikan identifikasi kebutuhan perencanaan kampung tematik. Sedangkan pada bagian akhir akan disampaikan kemungkinan implementasi kajian perencanaan kampung tematik dari perspektif geospasial.

## PERENCANAAN KAMPUNG TEMATIK

### KEGIATAN SURVEI LAPANGAN

Kegiatan survei lapangan ke lokasi kampung tematik bertujuan untuk mengidentifikasi potensi atau kendala yang mungkin ditemui dalam perencanaan kampung tematik. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam survei lapangan adalah audiensi dengan pemangku kepentingan di kampung tematik. Pemangku kepentingan di lokasi kampung tematik meliputi perwakilan kecamatan, perwakilan kelurahan, perwakilan RT/RW, perwakilan kompepar (komunitas penggerak pariwisata), dan lain-lain.

Pada tahun 2021, survei lapangan ke lokasi kampung tematik Ecoriparian Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal tahun 2021 (Foto 1). Pada kegiatan ini, berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor ikut serta seperti Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Tanah Sareal dan Kelurahan Sukaresmi dan lain-lain. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh anggota Satgas Naturalisasi Ciliwung.

Hasil dari kegiatan pada tahun 2021 ini, penelusuran jalur yang direncanakan sebagai jalur trekking wisata dan identifikasi lokasi-lokasi sepanjang jalur wisata yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan wisata Ecoriparian. Pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan survei lapangan ke lokasi Kelompok Tani Dewasa (KTD) yang berdekatan Kampung Lauk di Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat.

Selanjutnya pada tahun 2022, tim dosen Departemen Arsitektur Lanskap IPB University bersama Bappeda Kota Bogor dan perangkat daerah terkait melakukan survei lapangan ke lokasi kampung tematik dan calon lokasi kampung wisata (Foto 2). Lokasi kampung tematik yang dikunjungi adalah Pulo Geulis, Kampung Labirin, Ecoriparian dan Kampung Teuweul. Sedangkan calon lokasi kampung wisata yang disurvei adalah Kampung Legok Muncang di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan.



Foto 1. Survei lapangan ke lokasi tematik Ecoriparian



Foto 2. Rangkaian Survei lapangan ke: (1) Kampung Teuweul, (2) Kampung Legok Muncang, (3) Pulo Geulis, (4) Kampung Labirin

## KEBUTUHAN PERENCANAAN KAMPUNG TEMATIK

Pada kajian pemilihan prioritas lokasi pengembangan kampung tematik yang telah dilakukan pada tahun 2021, metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) telah digunakan untuk memberikan skor prioritas di tiap lokasi kampung tematik. Untuk melaksanakan perencanaan makro kampung tematik yang menjadi ranah Bappeda Kota Bogor, maka perlu dilaksanakan kajian untuk melanjutkan analisis dari hasil kajian lokasi kampung tematik. Terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, terdapat empat bidang di Bappeda Kota Bogor yang terdiri dari:

- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,
- Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dari keterkaitan masing-masing bidang di Bappeda Kota Bogor, secara umum tugas yang diamanatkan berupa perumusan kebijakan teknis di bidang masing-masing maka diperlukan kajian lanjutan untuk perencanaan kampung tematik yang mungkin dilakukan secara lintas bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian spasial dapat diimplementasikan untuk menjawab secara spesifik pertanyaan:

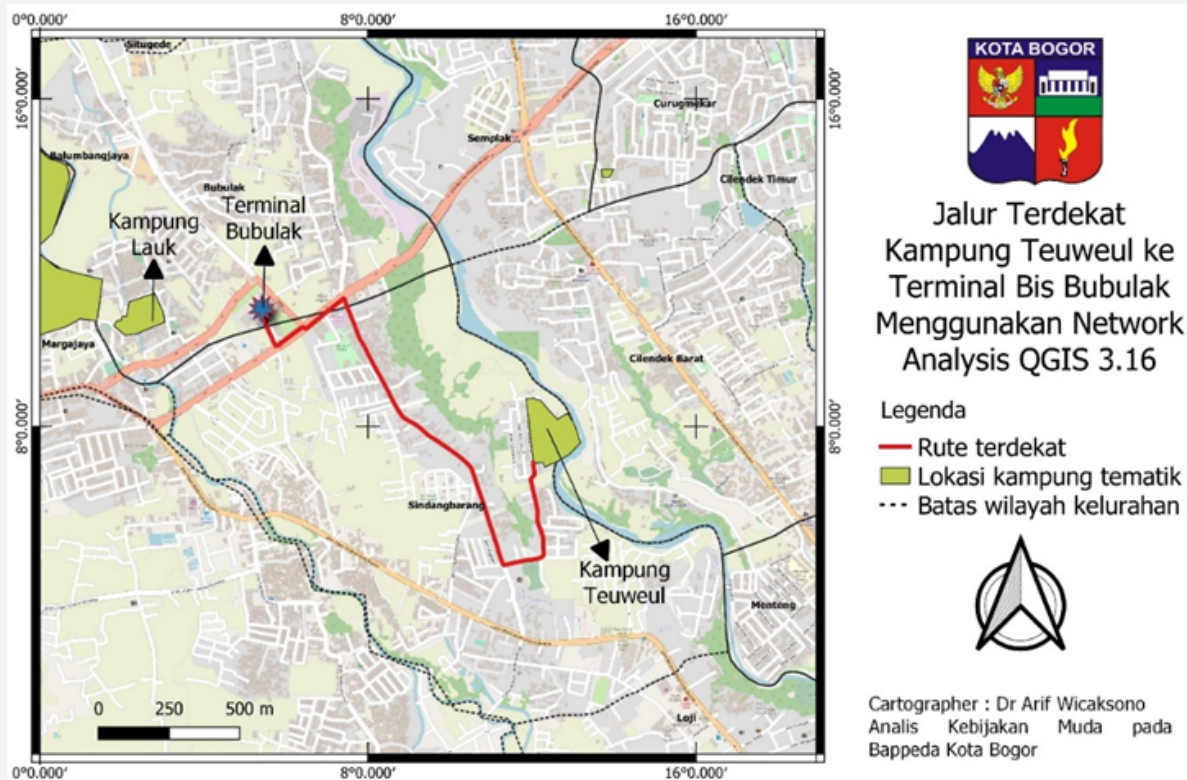
1. Bagaimana akses transportasi publik ke lokasi kampung tematik ?
2. Sejauh mana keterkaitan antara lokasi kampung tematik dengan lokasi-lokasi perencanaan lainnya seperti pusat kuliner dan sarana olahraga di tiap kecamatan?

## METODE SPASIAL UNTUK PERENCANAAN KAMPUNG TEMATIK

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dari perspektif spasial, maka dilakukan studi literatur untuk mencari metode-metode spasial. Berikut ini disajikan dalam bentuk matriks kemungkinan metode spasial yang dapat digunakan dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut.

**Tabel 1. Beberapa metode kajian yang terkait dengan kajian kampung tematik**

Sumber	Metode yang Digunakan
Talebi dkk (2019)	Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis website untuk lokasi-lokasi masjid di Kota Bukittinggi. Website ini memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peta lokasi masjid</li><li>• Informasi detail lokasi masjid</li><li>• Rute transportasi publik</li><li>• Peta rute</li><li>• Peta lokasi obyek di sekitar masjid seperti restoran, acara wisata dan lain – lain.</li></ul>
Montoya dkk (2021)	Penyusunan alternatif jadwal waktu kunjungan ke lokasi wisata Gunung Api Altar Volcano, Taman Nasional Sangay, Ekuador dengan mempertimbangkan jarak antar obyek wisata menggunakan rute yang dihasilkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan waktu tempuh.

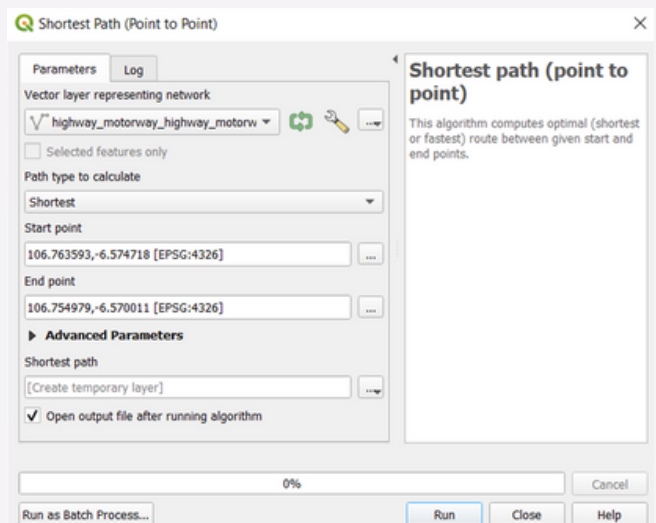


Gambar 1. Rute terdekat Kampung Teuweul ke Terminal Bubulak hasil network analysis (Sumber: Pengolahan data menggunakan QGIS 3.16)

## PENGEMBANGAN KAJIAN SPASIAL KAMPUNG TEMATIK

Sebagai ilustrasi implementasi kajian kampung tematik, maka pada artikel ini akan disajikan contoh sederhana penerapan metode SIG yang menghubungkan lokasi kampung tematik Kampung Teuweul dengan Terminal Bubulak (Gambar 1). Untuk data lokasi Kampung Teuweul bersumber dari Bappeda Kota Bogor (2021), sedangkan lokasi Terminal Bubulak diunduh dari *OpenStreetMap*©.

Hasil analisis diperoleh dari pengolahan data menggunakan piranti lunak QGIS 3.16 dengan menggunakan menu *shortest distance* (Gambar 2). Data spasial jalan dalam bentuk shp diunduh dari *OpenStreetMap*©([www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)).



Gambar 2. Screenshot menu *shortest distance* pada piranti lunak QGIS 3.16 menggunakan metode *network analysis* pada QGIS 3.16 (Sumber : Pengelolaan data menggunakan QGIS 3.16)

Dapat disimpulkan bahwa SIG menawarkan berbagai macam alat analisis yang bisa digunakan dalam mengembangkan kajian perencanaan kampung tematik dari perspektif spasial. Untuk piranti lunak SIG yang *open source* seperti QGIS, juga menawarkan beberapa data yang dapat diunduh seperti jaringan jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Kota Bogor (2021). *Kajian Pemilihan Lokasi-Lokasi Prioritas Pembangunan Kampung Tematik di Kota Bogor*. Bogor: PT Nusantara Urban Advisor

Montoya, A. V. G., Esparza Parra, J. F., Chávez Velásquez, C. R., Tito Guanuche, P. E., Parra Vintimilla, G. M., Mestanza-Ramón, C., & Vizuite, D. D. C. (2021). A Nature Tourism Route through GIS to Improve the Visibility of the Natural Resources of the Altar Volcano, Sangay National Park, Ecuador. *Land*, 10(8), 884. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/land10080884>

Talebi, M., Majnounian, B., Makhdoum, M., Abdi, E., Omid, M., Marchi, E., & Laschi, A. (2019). A GIS-MCDM-based road network planning for tourism development and management in Arasbaran forest, Iran. *Environmental monitoring and assessment*, 191(11), 647. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7831-3>





Foto: Pemkot Bogor

# Taleus Bogor

## INOVASI SINERGI PENTA HELIX UNTUK CEGAH STUNTING DI KOTA BOGOR

Syifa Ruhani  
Bappeda Kota Bogor

Indonesia saat ini masih menghadapi salah satu tantangan berkaitan dengan permasalahan gizi buruk. Kurangnya asupan gizi dalam rentan waktu yang cukup lama akan menyebabkan anak berisiko *wasting*, *stunting*, dan *underweight*. Berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021 bahwa angka prevalensi *stunting* nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun, dengan data terakhir 27,7% di tahun 2019 kemudian di tahun 2021 berhasil mencatat angka 24,4%.

“*Stunting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang pada umumnya diakibatkan oleh malnutrisi, terserang infeksi, pengasuhan dan stimulasi psikososial yang kurang memadai

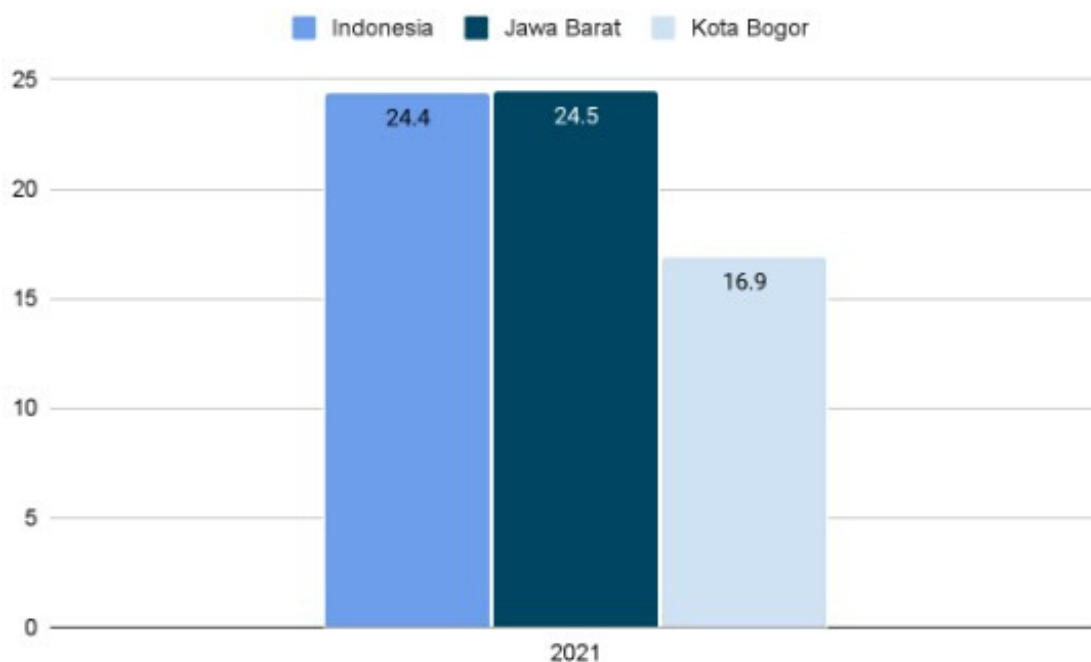
World Health Organization (WHO)

*Stunting* menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, kurangnya kemampuan kognitif yang berpengaruh pada kecerdasan anak dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular (degeneratif) di usia dewasa. Hal ini tentu akan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia yang juga akan mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Berdasarkan riset *World Bank* 2016, rendahnya produktivitas pada usia dewasa sebagai dampak jangka panjang dari kasus *stunting* akan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila PDB Indonesia sebesar Rp 13.000 triliun, maka potensi kerugian yang dicapai adalah Rp 260-390 triliun per tahun.

Tantangan ini harus diatasi agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing dan berkualitas sekaligus mewujudkan masa depan Indonesia menuju Generasi Emas 2045 (*Indonesia's Golden Generation in 2045*). Maka dari itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mana didalamnya menargetkan penurunan angka prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) bahwa angka prevalensi *stunting* di Jawa Barat pada tahun 2021 adalah 24,4%. Angka prevalensi tersebut dikategorikan tinggi mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target 19,2% pada tahun 2023 guna mencapai tujuan program Jabar *Zero New Stunting* sekaligus mendukung program prioritas nasional untuk menurunkan kasus *stunting*.



Grafik 1. Perbandingan Balita Stunting Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor pada Tahun 2021

Menurut riset SSGBI 2021, angka prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 24,4% atau sekitar 5,33 juta balita. Angka ini melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu 20%. Hal ini menjadikan *stunting* sebagai ancaman bagi masa depan Indonesia.

Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita *stunting* di Kota Bogor pada tahun 2021 tercatat sebesar 16,9%. Kota Bogor menjadi salah satu kota/kab di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang rendah atau termasuk dalam kategori hijau (10-20%) bersama dengan Kota Depok, Kuningan, Subang, Indramayu, Kota Sukabumi, Ciamis, dan Kota Bekasi.

Kota Bogor menjadi salah satu kota/kab di Provinsi Jawa Barat yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang rendah atau termasuk dalam kategori hijau

Meskipun *stunting* di Kota Bogor cenderung rendah, namun pemerintah daerah terus berusaha menekan angka prevalensi *stunting* melalui penguatan pemahaman, komitmen, sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor bertujuan untuk menikmati momentum bonus demografi dimana Jawa Barat saat ini tengah memasuki fase bonus demografi yaitu usia produktif akan lebih banyak jika dibandingkan dengan usia non produktif. Untuk mewujudkan bonus demografi yang berkualitas, maka pemerintah melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah lahirnya bayi *stunting* baru di Kota Bogor. Maka tujuan dari penulisan ini adalah membahas permasalahan terkait kondisi status *stunting* di Kota Bogor yang kemudian menyajikan upaya pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi *stunting* melalui Program Tanggap Leungitkeun *Stunting* di Kota Bogor atau “Taleus Bogor” dengan mengedepankan pendekatan *penta helix*.

## Faktor Penyebab *Stunting*

*Stunting* menjadi bentuk kegagalan dalam masa pertumbuhan (*growth faltering*) yang diakibatkan oleh ketidakcukupan dan ketidakseimbangan asupan gizi yang dimulai sejak masa kehamilan hingga balita atau 1000 hari pertama kehidupan (HPK). *Growth faltering* dapat didefinisikan sebagai suatu proses melambat atau terhentinya tumbuh kembang pada anak. Kegagalan dalam masa pertumbuhan ditentukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan. Akibat dari kegagalan pertumbuhan yang dialami balita dapat berkontribusi pada morbiditas, mortalitas serta fungsi kognitif balita. Gangguan pertumbuhan balita dianggap sebagai manifestasi dari malnutrisi kronis khususnya dalam periode 1000 HPK yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Ketidakcukupan gizi yang dialami pada periode 1000 HPK menjadi ancaman bagi beberapa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.



Penyebab anak yang mengalami *stunting* bersifat multi dimensi antara lain: 1) Faktor orang tua meliputi masa neonatal, hubungan sosial ekonomi, ibu yang memiliki postur tubuh pendek menjadi penentu awal dari kejadian *stunting*; 2) Faktor anak yang meliputi pemberian asupan nutrisi dan gizi yang cukup dan seimbang, jenis kelamin, usia dan riwayat penyakit infeksi; 3) Faktor lingkungan meliputi sanitasi dan akses air bersih yang berpengaruh pada kehidupan janin.

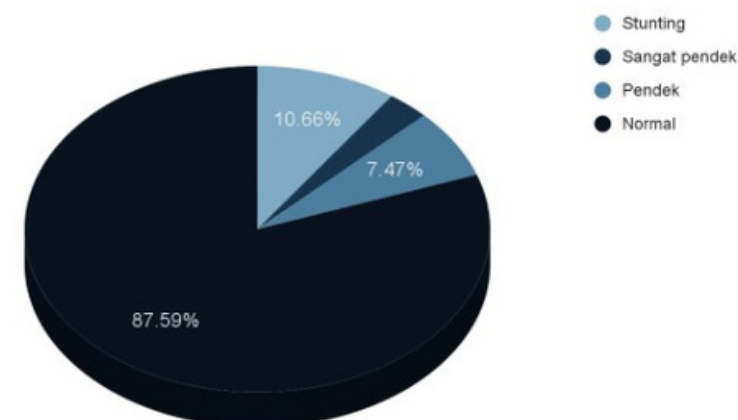
## Stunting di Kota Bogor

Jika mengaitkan faktor penyebab kejadian *stunting* dengan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat Kota Bogor, maka berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2020 bahwa cakupan rumah tangga per PHBS sebesar 65,5%. Dalam data tersebut juga menyajikan cakupan akses penduduk terhadap air minum sepanjang tahun 2018 - 2020 yang masing-masing sebesar 76,03%, 76,03% dan 73,37%. Sedangkan untuk cakupan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kota Bogor 76,53% atau 192.759 kepala keluarga dari 251.881 kepala keluarga yang tercatat.

Dengan melihat sajian data Dinas Kesehatan Kota Bogor tersebut, pemerintah daerah hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan gerakan PHBS di Kota Bogor yang merupakan langkah besar dalam upaya pencegahan *stunting*. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini berupaya untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kota Bogor melalui intervensi yang intensif.

Berdasarkan hasil pengukuran Bulan Penimbangan Balita di Kota Bogor pada tahun 2019 bayi yang mengalami *stunting* sebesar 4,52%, angka prevalensi *stunting* tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 10,66% akibat pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 mengalami tren menurun menjadi 5,33%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh IPB University, bahwa kenaikan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2020 disebabkan oleh pemberian ASI eksklusif yang rendah, anemia yang dialami oleh ibu hamil serta kaitannya dengan gizi masyarakat.

Selain melihat dari hasil pengukuran Bulan Penimbangan Balita, pemerintah daerah Kota Bogor juga menetapkan lokasi fokus (lokus) *stunting* untuk dilakukan intervensi yang terkoordinir dan konvergen. Lokus *stunting* di Kota Bogor pada tahun 2022 terdiri dari 12 kelurahan diantaranya Mulyaharja, Muarasari, Curug, Pakuan, Pamoyanan, Harjasari, Bantarjati, Batutulis, Bubulak, Tegalgundil, Bondongan dan Ranggamekar. Sedangkan untuk tahun 2023, lokus *stunting* di Kota Bogor yang akan dilakukan intervensi sebanyak 8 kelurahan yaitu Cikaret, Tanah Baru, Kencana, Ranggamekar, Tegallega, Bubulak, Cilendek Timur dan Curug.



Grafik 2. Prevalensi Balita Pendek di Kota Bogor Tahun 2020

Pada tahun 2021, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kasus *stunting* di Kota Bogor seperti riwayat berat badan lahir bayi prematur atau BBLR, balita yang mengidap pneumonia, balita yang mengalami diare serta akses ke sanitasi dasar yang belum terpenuhi.

## *Tanggap Leungitkeun Stunting di Kota Bogor*

Pemerintah daerah Kota Bogor terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* melalui program, kegiatan atau terobosan yang ditujukan untuk mencegah atau menangani *stunting*. Dinas Kesehatan didukung dengan multi pihak bersama-sama membuat sebuah inovasi terpadu untuk menekan angka prevalensi *stunting* melalui Program "Taleus Bogor" yang merupakan singkatan dari Tanggap Leungitkeun *Stunting* di Kota Bogor. Program "Taleus Bogor" merujuk pada *penta helix approach* yang bersifat menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat pun bergerak untuk peduli terhadap permasalahan *stunting*.

“  
Stakeholders yang terlibat dalam  
*Penta Helix* diantaranya  
pemerintah, akademisi,  
masyarakat atau komunitas, serta  
dunia usaha atau kemitraan.  
”



Foto: Pemkot Bogor

**Grafik 3. Mekanisme dan Rancangan "Taleus Bogor"**

Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Layanan sesuai Standar						
Orientasi Simulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Intervensi Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) pada RS swasta	Orientasi juknis pelayanan posyandu remaja bagi petugas Puskesmas dan kader kesehatan remaja	Germas Fest di Sekolah	Pemeriksaan Hb	Belanja cetak



Perbaikan Status Gizi Masyarakat			
Status Gizi Remaja melalui Pelatihan Kader Cermin Sehatku	Status Gizi Balita melalui Bulan Tumbuh Kembang Penimbangan Balita, Distribusi serta Pemantauan Vitamin A dan PMT	Status Gizi Ibu Hamil melalui Bulan Ibu Hamil dan Distribusi PMT Ibu Hamil	Pendidikan Gizi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK). Ibu Menyusui dan Balita Gizi Kurang



Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyerbarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media	Pembentukan jejaring promosi kesehatan

Dalam pelaksanaannya, program "Taleus Bogor" menggunakan dua bentuk intervensi diantaranya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang mencakup sinergitas, terpadu, berjenjang dan basis pendekatan *continuum of care* yang akan difokuskan pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak sekolah sebagai sasaran implementasi program "Taleus Bogor". Melalui Program Taleus Bogor, pemerintah Kota Bogor berupaya menurunkan angka prevalensi *stunting* melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja dan ibu hamil, peningkatan pemahaman atau pengetahuan kepada calon pengantin mengenai 1000 HPK, peningkatan pengetahuan terkait asupan gizi bagi balita kepada ibu, peningkatan dukungan dan capaian ASI eksklusif bagi ibu menyusui hingga penyuluhan kepada kader terkait pemberian makan bayi dan anak.

Berdasarkan data analisa situasi *stunting* Kota Bogor Tahun 2021, cakupan layanan bagi remaja diantaranya rata-rata cakupan remaja yang mengkonsumsi TTD sebesar 37,85% dari target 58%, rata-rata cakupan calon pengantin yang mendapatkan TTD sebesar 79,52% dari target 90%, rata-rata cakupan pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi 3 bulan pranikah sebesar 98,96% dari target 90%, rata-rata calon pasangan pengantin yang mendapat bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting* sebesar 79,52% dari target 90%.

Cakupan layanan bagi ibu hamil meliputi rata-rata cakupan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat tambahan asupan gizi sebesar 100% dari target 90%, rata-rata cakupan ibu hamil yang menerima TTD minimal 90 tablet pada masa kehamilan sebesar 79,52% dari target 80%. Sedangkan cakupan layanan bagi balita yaitu rata-rata cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif 74,60% dari target 80%, rata-rata cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebesar 100% dari 80%, rata-rata cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk sebesar 100% dari target 90%, rata-rata cakupan balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi sebesar 100% dari target 90% serta rata-rata cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur sebesar 54,41% dari target 90%.



Foto: Puskesmas Warung Jambu



Foto: Bogordaily.net



Foto: Pemkot Bogor

## *Komitmen untuk melakukan intervensi secara terpadu*

Pemerintah Kota Bogor berusaha memaksimalkan cakupan layanan intervensi *stunting*, sejalan dengan yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor bahwa kunci dari pelaksanaan program penurunan prevalensi *stunting* adalah konvergensi yang terpadu dan melibatkan stakeholder, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi perlunya komitmen dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat. *Stunting* menjadi prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), penting untuk menentukan lokasi dan besaran anggaran agar pelaksanaan konvergensi penurunan atau pencegahan *stunting* tepat sasaran. Kaitan *stunting* dengan pembangunan daerah terfokus pada kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Pentingnya merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program yang menunjang dan mendukung kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, mengingat kualitas sumber daya manusia menjadi suatu indikator kemajuan pembangunan suatu daerah. Sehingga, pelaksanaan Taleus Bogor ini sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga dan misi Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.







Foto: P2PTM Kementerian Kesehatan RI



Foto: Humas Kemprov Jabar



Foto: BarayaNews



Foto: Pemkot Bogor



Foto: Humas Setkab RI

## Daftar Pustaka

1. Akbar, F, dkk. (2021). Strategi Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
2. Howard, J. (2012). "Growth and Development: Morphology, Mechanisms, and Abnormalities." dalam Bone Histology: An Anthropological Perspective, diedit oleh Christian Cowder dan Sam Stout. CRC Press: Florida.
3. Roshia, B, dkk. (2020). Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Stunting di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019), Buletin Penelitian Kesehatan, 48 (3). Diakses dari <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/bpk/article/view/3131>
4. Wulandari, W dan Trini Sudiarti. (2021). Nutrition Intake and Stunting of Under-Five Children in Bogor West Java, Indonesia, HSOA Journal of Food Science & Nutrition, 7 (104). Diakses dari [https://www.heraldopenaccess.us/article\\_pdf/33/nutrition-intake-and-stunting-of-under-five-children-in-bogor-west-java-indonesia.pdf](https://www.heraldopenaccess.us/article_pdf/33/nutrition-intake-and-stunting-of-under-five-children-in-bogor-west-java-indonesia.pdf)
5. Guru Besar IPB University Mengabdikan Temuan Penyebab Kenaikan Angka Stunting di Kota Bogor Saat Pandemi. (2020). LPPM IPB. Diakses dari <https://lppm.ipb.ac.id/guru-besar-ipb-university-mengabdikan-temuan-penyebab-kenaikan-angka-stunting-di-kota-bogor-saat-pandemi/>
6. Cara Kota Bogor Cegah Stunting melalui Teleus. (2021). Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/cara-kota-bogor-cegah-stunting-melalui-teleus>
7. Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. (2019). Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari <https://bappeda.jatengprov.go.id/konvergensi-percepatan-penurunan-stunting-di-provinsi-jawa-tengah/>
8. Pemkot Bogor Punya Taleus untuk Menangani Stunting. (2020). Medcom.id. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Wb70W0rk-pemkot-bogor-punya-taleus-untuk-menangani-stunting>
9. Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2021 sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. (2021). Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari [https://www.kemkes.go.id/article/view/21122800001/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045.html#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20SSGI%20tahun%202021,5%20provinsi%20yang%20menunjukkan%20kenaikan\[es1\]](https://www.kemkes.go.id/article/view/21122800001/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045.html#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20SSGI%20tahun%202021,5%20provinsi%20yang%20menunjukkan%20kenaikan[es1])
10. Vice President: 14 Percent Reduction Target for Stunting Must be Achieved. (2022). VOI. Diakses dari <https://voi.id/en/news/166604/vice-president-14-percent-reduction-target-for-stunting-must-be-achieved>
11. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021. (2021). Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>
12. Cetak Generasi Emas, Puan Maharani Tekankan RI Harus Bebas Stunting. (2022). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37279/t/Cetak+Generasi+Emas%2C+Puan+Maharani+Tekankan+RI+Harus+Bebas+%E2%80%98Stunting%E2%80%99>
13. Inovasi Pemkot Bogor Hilangkan Stunting Lewat Program 'Taleus' Bogor. (2022). Radar Bogor. Diakses dari <https://www.radarbogor.id/2022/06/15/inovasi-pemkot-bogor-hilangkan-stunting-lewat-program-taleus-bogor/>
14. Pelatihan Kader Taleus Tanggap Leungitkeun Stunting, Cegah Stunting, Tolak Stunting. (2019). PKM Warung Jambu. Diakses dari <https://pkmwarungjambu.kotabogor.go.id/welcome/post/single/27>



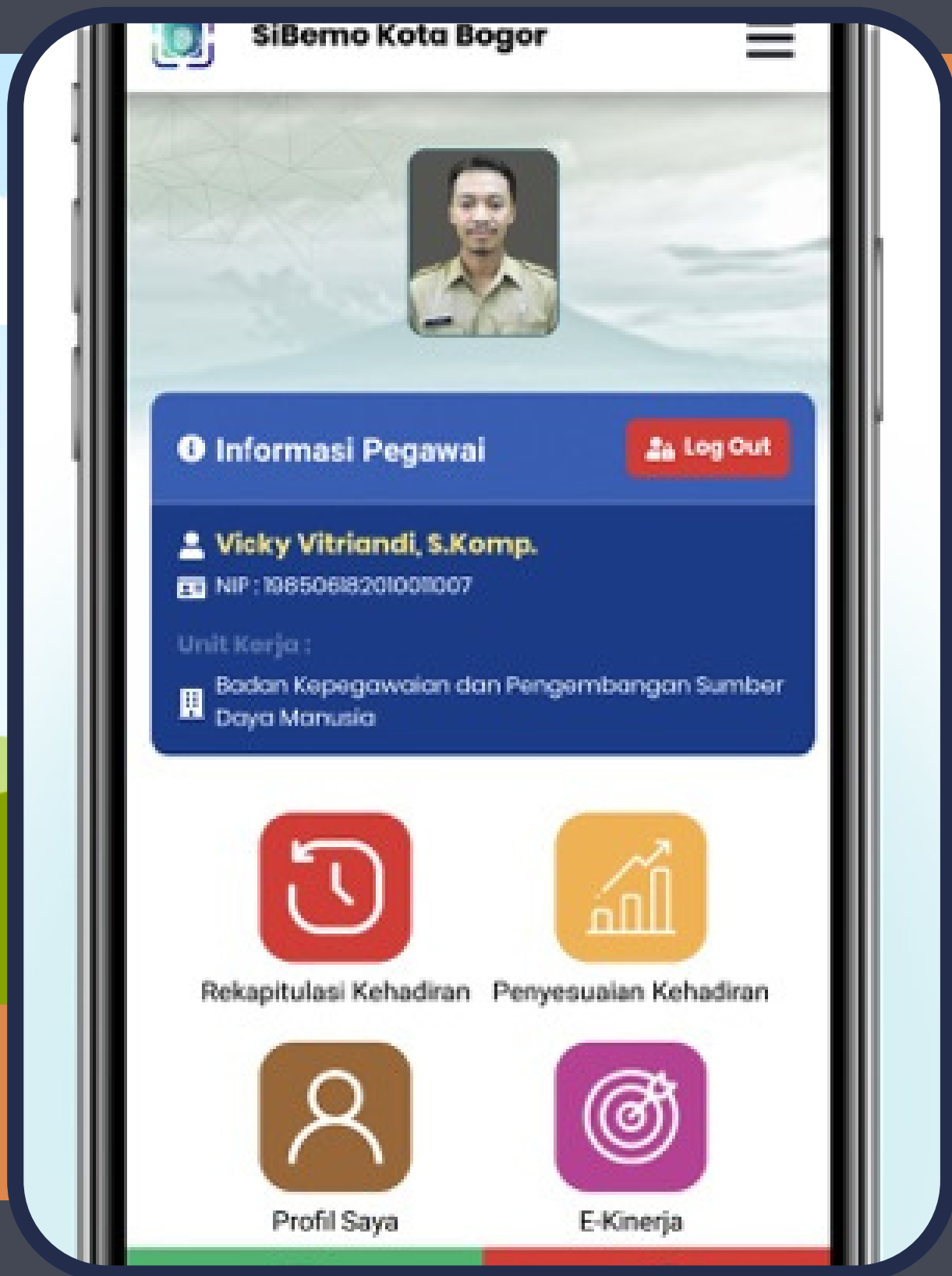
# Bogor Menuju Kota Inovasi

**Muhammad Esa Alhasyir Sae**  
Institut Teknologi Sumatera

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya alam tersebut agar memiliki nilai tambah, berdaya saing, unggul dan dapat dikembangkan di masyarakat luas sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam agar memiliki nilai tambah dan berdaya saing, diperlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu membawa perubahan pada suatu produk menjadi unggul dan bernilai tinggi.

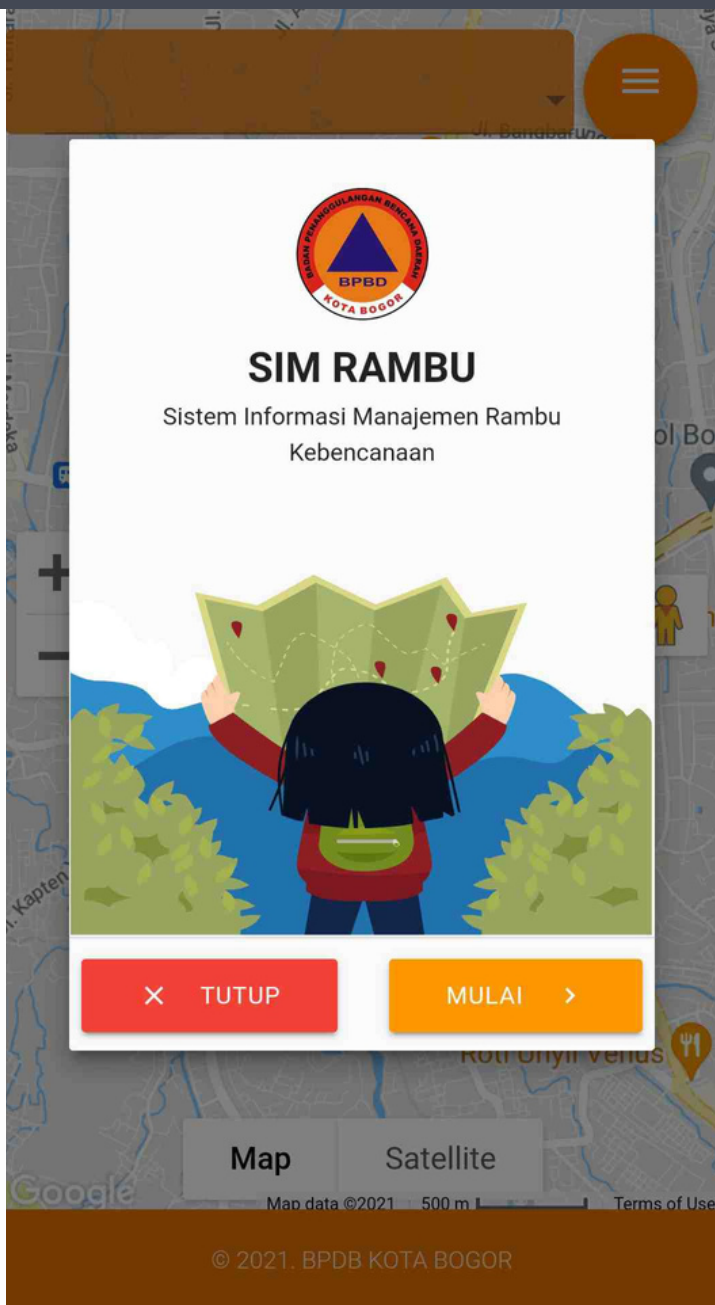
Di era kehidupan manusia modern dengan segala permasalahan yang rumit dan banyak tentunya manusia ingin menyelesaikannya dengan cepat dan mudah. Disini inovasi dengan segala kemudahannya datang sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi manusia. Dengan adanya produk-produk dari inovasi kita dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko dan segala kemudahan lainnya.

Walaupun masih dalam kondisi pandemi, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat Bogor, dilansir dari kotabogor.go.id terhitung di tahun 2019, kota bogor telah mencanangkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) proyek inovatif yang diusung oleh berbagai macam dinas di berbagai bidang. Biasanya inovasi-inovasi yang dilahirkan juga bertujuan untuk menaikkan produktivitas dan kualitas pelayanan mereka, sehingga akan mempermudah urusan masyarakat jika ingin menggunakan pelayanan mereka.



Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi SIBEMO Kota Bogor

Dikutip melalui akun Instagram resmi Pemkot Bogor, @pemkotbogor, ada beberapa inovasi yang dihasilkan. Inovasi-inovasi yang dihasilkan dapat berupa aplikasi untuk android yang dapat diakses oleh masyarakat luas, seperti SIBEMO (Absensi Berbasis Mobile) yaitu aplikasi absensi online berbasis Android dan IOS untuk mencatat kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. SIBEMO dapat digunakan untuk melakukan absensi di dalam area unit kerja dengan mengaktifkan GPS pada ponsel android PNS Pemerintah Kota Bogor.



Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi SIRUBEN Kota Bogor

Kemudian ada **SIRUBEN** (Sistem Informasi Manajemen Rambu Kebencanaan) yang merupakan sebuah aplikasi untuk pengadaan rambu-rambu himbauan kebencanaan di Kota Bogor. Inovasi ini digagas oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

Selain itu, terdapat juga inovasi yang dikembangkan Kota Bogor dalam rangka penanganan Covid, yaitu:

**1. DETEKTIF (Deteksi Aktif) terdiri dari unit pelacakan dan unit pemantauan;**

- Terbentuknya Tim Detektif COVID-19 di tingkat Kecamatan dan Desa yang bertugas melacak kontak kasus positif dalam waktu 2 X 24 jam, dilanjutkan dengan asesmen kapasitas, isolasi mandiri, memfasilitasi rumah isolasi, dan memfasilitasi rujukan kasus. ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
- Tim Pemantau Detektif COVID-19 adalah tim pemantau yang dibentuk di tingkat RW yang terdiri dari 1 (satu) kader dengan koordinator petugas surveilans Puskesmas, tim ini bertugas memantau pasien COVID-19 yang diisolasi di rumah atau isolasi di fasilitas Kelurahan, pemantauan berupa keluhan/kondisi kesehatan dan pendisiplinan.

**2. Satuan Pendidikan Penanganan COVID-19 Kota Bogor dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu;**

- Tim Merpati yang terdiri dari Tenaga Kesehatan (Dokter), tokoh agama dan ulama serta relawan, alumni COVID (Temanco) dan satgas nasional yang bertugas mengedukasi, merumuskan strategi, dan mempublikasikan protokol kesehatan kepada masyarakat;
- Tim Elang sebagai tim pengawas dari HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kota Bogor, Karang Taruna, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kota Bogor bertugas mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan protokol kesehatan, mengawasi TNI, Polri dan Satpol PP untuk mendata dan menindak pelanggar.



## PELUNCURAN BOGOR INNOVATION AWARD

Upaya-upaya terus dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan menyebarkan sesi #SelasaInovasi yang dilaksanakan setiap hari Selasa melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga telah meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah paling inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020. Ini juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor, seperti meluncurkan BIA (Bogor Innovation Award) untuk merangsang munculnya inovasi-inovasi yang baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Inovasi yang dilahirkan tidak harus rumit, sebaliknya bisa inovasi sederhana namun ada nilai kebaruan dan ada nilai kebermanfaatannya bagi kehidupan.

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar memiliki nilai tambah, berdaya saing, unggul dan dapat dikembangkan di masyarakat luas, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki dilakukan agar memiliki nilai tambah dan berdaya saing, diperlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu membawa perubahan pada suatu produk menjadi unggul dan bernilai tinggi, karena itulah Bappeda Kota Bogor rutin mengadakan BIA.



# TINGKATKAN LAYANAN, KOTA BOGOR LUNCURKAN BERAGAM INOVASI

**M. Eka Riswandi**  
Institut Teknologi Sumatera



Negara Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun hal ini tidak selaras dengan pemanfaatan dalam sumber daya alam tersebut sehingga tidak mengalami kemajuan yang pesat. Maka demikian inovasi daerah sangat diperlukan dalam pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi – potensi yang ada di daerah Indonesia, salah satunya di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor telah menciptakan banyak inovasi demi menjadikan Kota Bogor yang terinovatif. Inovasi ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari – hari. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan dari berbagai perangkat kerja daerah. Kota Bogor berada di peringkat kedua untuk kategori Pemerintahan Kota Se-Indonesia Pada Tahun 2019. Permasalahan di Kota Bogor seperti masalah terkait mengelola absensi karyawan, pengajuan hibah dan bantuan sosial, informasi untuk kebencanaan, tata kelola lingkungan yang baik, pemantauan aktivitas tata ruang sehingga Pemerintah Kota Bogor membuat beberapa program inovasi untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa inovasi yang telah dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bogor.

## INOVASI

*Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.*

# BOTAK

Dengan adanya pemanasan global yang semakin parah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor membuat program dimana Bogor Tanpa Kantong Plastik atau biasa disebut dengan Botak. Program ini sejalan dengan Kota Bogor dengan konsep Smart City karena dapat mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan sehingga tidak merusak kota untuk generasi yang akan mendatang.



Gambar 1. Kegiatan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik  
Sumber: Jabarantaranews.com

# SAHABAT



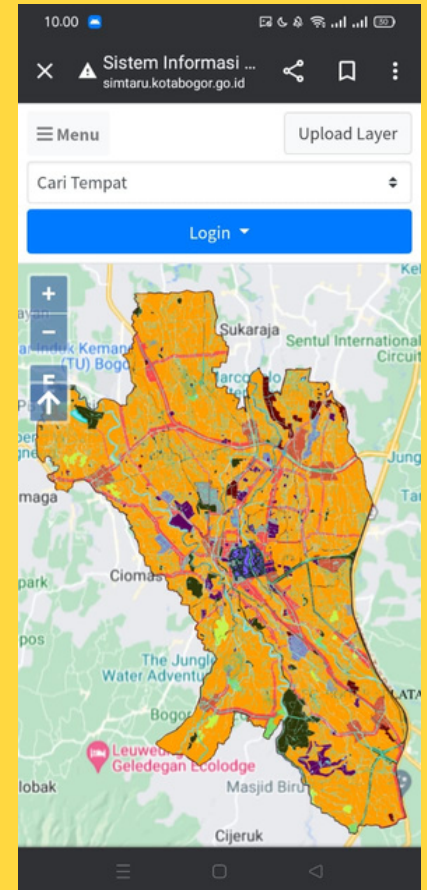
Gambar 2. Aplikasi SAHABAT Kota Bogor  
(Sumber: Google Play Store)

Pemerintah Kota Bogor membuat suatu sistem yang bernama Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu yang disingkat SAHABAT yang telah dibuat oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat Kota Bogor dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hibah bansos. Dengan adanya SAHABAT, masyarakat dapat memantau jalannya hibah bansos proposalnya diterima, ditolak, sedang diverifikasi dan lainnya. Dengan demikian dapat memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan pada pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor. Beberapa manfaat yang diberikan dengan adanya SAHABAT adalah:

1. Perencanaan dan penganggaran hibah bansos setiap tahun lebih tertata dan terstrukturnya.
2. Seluruh perangkat daerah terkoneksi pada database sehingga mengurangi kemungkinan tumpang tindih permohonan
3. Masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi tentang proposal yang diajukan maupun konten lain yang berkaitan dengan hibah bansos seperti berupa peraturan-peraturan, format-format proposal permohonan dan pencairan, persyaratan dan kriteria, dan alur prosedur hibah bansos.
4. Memudahkan Perangkat Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial.

# SIMTARU

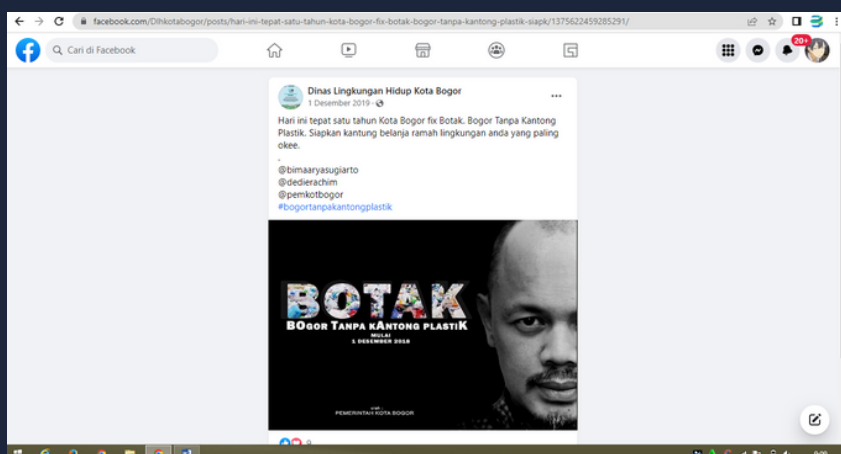
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat program Sistem Informasi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang atau Simtaru untuk memantau aktivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang Kota Bogor. Sistem ini sangat bermanfaat untuk memantau sudah sejauh mana program tersebut dilaksanakan. Berikut adalah keunggulan yang diberikan dari aplikasi simtaru adalah peta yang digunakan adalah peta dari pola ruang RTRW, memiliki transparansi yang membuat masyarakat Kota Bogor dapat mengakses pola ruang RTRW melalui website, fiturnya saling terhubung dengan OPD, dan saling terhubung antar OPD dengan Sistem Informasi Perizinan



Gambar 3. Aplikasi Simtaru Kota Bogor  
Sumber : [simtaru.kotabogor.go.id](http://simtaru.kotabogor.go.id)



Gambar 4. Pengenalan Aplikasi SAHABAT dalam media Instagram Pemerintah Kota Bogor



Gambar 5. Pengenalan Program BOTAK dalam media Facebook Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor mensosialisasikan berbagai inovasi yang telah diberikan dapat dilihat oleh masyarakat melalui beberapa media seperti berita, Instagram, dan Facebook. Dengan adanya berbagai inovasi – inovasi pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bogor diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor.



## DAFTAR BACAAN

Content Writer. 2019. "Resmi Diluncurkan Sahabat Permudah Pemkot Bogor Jalankan Transparansi Hibah Bansos", <https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/26/resmi-diluncurkan-sahabat-permudah-pemkot-bogor-jalankan-transparansi-hibah-bansos>, diakses pada rabu, 29 Juni 2022 pada pukul 13.00 WIB

Naryo. 2019. Sederet Inovasi menjadikan Kota Bogor Kota Terinovatif", <https://megapolitan.antaranews.com/berita/73351/sederet-inovasi-menjadikan-kota-bogor-kota-terinovatif>, diakses pada 29 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB

Madani, Alya. 2021. "Jelang Hari Jadi Bogor ke-539, Intip Beberapa Inovasi dari Pemkot Bogor Berikut Ini", <https://bogor.pikiran-rakyat.com/lokal-bogor/pr-081991958/jelang-hari-jadi-bogor-ke-539-intip-beberapa-inovasi-dari-pemkot-bogor-berikut-ini>, diakses pada rabu, 29 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB

<http://simtaru.kotabogor.go.id/>, diakses pada selasa, 28 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB


<http://sahabat.kotabogor.go.id/hello/faq>, diakses pada rabu, 29 Juni 2022 pada pukul 11.00 WIB





2022


## Alamat Korespondensi


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor  
Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota  
Bogor, Jawa Barat 16122

 Telepon: (0251) 8338052

 Website: <http://bappeda.kotabogor.go.id>

 Email: [bappeda@kotabogor.go.id](mailto:bappeda@kotabogor.go.id)

 Instagram: @bappeda.kotabogor

 Twitter: @BappedaBogor

ISSN 2962-4045

